

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas menggunakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan walikota tersebut.

Implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter & Carl Van Horn (dalam Mulyadi, 2018), yaitu:

- a. Faktor pendukung mencakup adanya standar dan sasaran yang jelas dan terukur; sumber daya manusia yang kompeten di DKK Semarang, Puskesmas Bandarharjo, dan Posyandu Tanjung Mas; anggaran yang memadai di DKK Semarang dan Puskesmas Bandarharjo; ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai; pelaksanaan komunikasi dan koordinasi antar badan pelaksana berjalan baik melalui rapat rutin dari level kota hingga lokal/kelurahan dan penggunaan media sosial; semua badan pelaksana telah memiliki struktur organisasi yang jelas; dukungan politik dari pemerintah dan *stakeholders* melalui berbagai bantuan yang disalurkan; dan disposisi pelaksana yang baik dengan adanya komitmen dan motivasi yang kuat dalam menjalankan tugas masing-masing.

- b. Terdapat faktor penghambat seperti kurangnya kompetensi pegawai Kasi Kesos Kelurahan karena koordinator *stunting* tidak relevan dengan riwayat pendidikan dan tidak diberikan pelatihan; usia kader posyandu yang mayoritas di atas 40 tahun; alokasi anggaran di Kelurahan Tanjung Mas belum optimal dan kurang memadainya anggaran di posyandu; kondisi ekonomi masyarakat yang tergolong menengah ke bawah dan adanya asumsi yang salah terkait *stunting*; serta kondisi sosial adanya penolakan intervensi dengan PMT, kurangnya partisipasi orang tua balita datang ke posyandu, dan pola asuh masih didasari menurut budaya turun temurun.

4.2 Saran

Peneliti memberikan saran untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan, yakni:

1. Peningkatan kompetensi Kasi Kesos Kelurahan

Pelatihan terkait masalah *stunting* diperlukan untuk koordinator agar memahami faktor penyebab dan dampaknya, memudahkan edukasi masyarakat dan identifikasi intervensi yang tepat. Pelatihan ini dapat melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan CSR, dengan harapan meningkatkan kompetensi, kepercayaan masyarakat, serta partisipasi dan pengetahuan Kasi. Kesos.

2. Kurangnya kader usia muda

Kader tiap Posyandu Tanjung Mas perlu melakukan regenerasi dengan melibatkan masyarakat yang berpotensi menjadi kader agar dilibatkan

dalam kegiatan Posyandu, sehingga ketika calon kader siap menjadi kader maka kader yang berusia tua dapat digantikan. Program rekrutmen, pelatihan, pemberian insentif bagi kader muda perlu dikembangkan untuk menarik generasi baru.

3. Alokasi anggaran di Kelurahan dan Posyandu

Kelurahan menambah alokasi dana dari Pemerintah Kota untuk menunjang beragam program dan kegiatan penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas. Agar masyarakat tidak harus mengeluarkan iuran kolektif untuk pelaksanaan program di posyandu.

4. Masalah kondisi ekonomi dan sosial

Pendekatan internal kepada orang tua balita yang menolak intervensi PMT dan kurang partisipasi di posyandu masih diperlukan, dengan mengedepankan edukasi dan konseling pribadi antara orang tua dan tenaga gizi. Untuk mendorong partisipasi, kegiatan menarik seperti lomba balita sehat, lomba kreativitas makanan, dan makan bersama di posyandu dapat diadakan. Selain itu, pengembangan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta koordinasi posyandu dengan pengasuh balita mengenai pentingnya gizi dan pengasuhan yang benar, dengan modul bacaan untuk orang tua. Program ini dapat melibatkan CSR dan Dinas terkait, seperti DP3A Kota Semarang.